



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 188-401.040/10/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

**KOTA MADIUN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 oleh Walikota Madiun dan telah dilakukan pembahasan bersama antara Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD pengusul, maka telah disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 dimaksud dapat disetujui dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Madiun tanggal 17 Juni 2021 Nomor 188/2144/401.013/2021 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 3 Mei 2021 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 3. Hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 6 Mei 2021 dengan acara Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun;
 4. Hasil Rapat Paripurna tanggal 7 Mei 2021 dengan acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 5. Hasil Pendampingan Tenaga Ahli tanggal 21-23 Juni 2021 dengan acara Pembahasan dan Pendalaman Materi 3 Raperda Kota Madiun Tahun 2021;

6. Hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 28 Juni 2021 antara Pansus DPRD dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun membahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
7. Hasil Pendampingan Tenaga Ahli tanggal 1-3 Juli 2021 dengan acara Finalisasi Pembahasan 3 Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
8. Hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 28 Juli 2021 dengan acara Finalisasi Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
9. Hasil Rapat Paripurna tanggal 29 Juli 2021 dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
10. Hasil Rapat Paripurna tanggal 30 Juli 2021 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 berdasarkan hasil Pembahasan bersama antara Pansus DPRD dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul.

- KEDUA : Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 30 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.